



JUM'AT, 01 FEBRUARI 2019

SUMBER BERITA

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Yakin Polda Usut Tuntas Kasus Pemotongan UP

BENGKULU - Pengamat Hukum Pidana Unihaz, Nedyanto, SH, MH yakin ada pelanggaran dan indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pemotongan insentif upah pungut (UP) pajak yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Dispenda Provinsi Bengkulu Heru Susanto. Apalagi, kalau

terbukti uang hasil pemotongan itu digunakan untuk hadiah pesta pernikahan anak Ridwan Mukti tahun 2016 lalu sewaktu menjabat Gubernur Bengkulu.

Nedyanto juga yakin tim penyelidikan Polda Bengkulu yang sudah menerima laporan dari Rofiq Sumantri akan mengusut tuntas

kasus tersebut. "Mereka (penyelidik) perlu memanggil pihak yang melakukan pemotongan itu. Memang harus segera dipanggil dan diperiksa. Mungkin sekarang Pulbaket dulu. mereka professional kok, saya yakin polda lebih tahu siapa yang harus diperiksa lebih dulu. Kasus ini akan diusut sampai

tuntas," kata Nedyanto.

Ia menilai bahwa pemotongan UP ini sudah jelas suatu pelanggaran dan harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itulah perlunya penyelidikan dan penyidikan.

► Baca YAKIN..Hal 1

Sambungan dari halaman 1

"Pemotongan ini dilakukan oleh mereka selaku PNS, artinya menyalahgunakan kewenangan. Saya pikir sudah masuk unsur tindak pidana korupsi (tipikor) nya," ujar Nedyanto.

Sedangkan mereka yang UP nya dipotong, kata Nedyanto adalah korban. Karena meskipun mereka waktu itu bersedia dipotong tapi karena terpaksa. "Mereka yang dipotong itu kan korban, terpaksa dipotong dan tidak bisa menolakkarena yang memotong adalah atasan. Buktinya kan korban keberatan sehingga melapor ke polda. Tapi sebenarnya

terlepas ada laporan atau tidak, pemotongan itu menyalahi kewenangan," ujar Nedyanto.

Selain pihak yang melakukan pemotongan yang harus bertanggung jawab, sambung Nedyanto, penyelidik Polda Bengkulu juga bisa menelusuri atau mencari aktor intelektual di atasnya. "Aktor intelektual yang memerintahkan itu juga harus dicari dan ditelusuri sejauh mana peran dan keterlibatannya. Bisa jadi juga pihak yang melakukan pemotongan itu hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan," demikian Nedyanto.

Senada dikatakan Pengamat Hukum lainnya dari Unihaz,

Sapuan Dani, SH, MH. Dia berpendapat bahwa ada indikasi perbuatan gratifikasi dalam kasus yang dilaporkan oleh Rofiq Sumantri. "Karena sudah ada indikasi awal pelanggaran dan perbuatan melawan hukumnya, kita dukung sepenuhnya untuk diusut dan diproses secara hukum," kata Sapuan.

Kalau menurut, Sapuan pihak yang harus bertanggungjawab adalah orang melakukan pemotongan UP itu, yakni Heru Susanto. Heru Susanto belum dapat dikonfirmasi. Bahkan no WhatsApp tiga wartawan RB yang hendak meminta konfirmasi malah diblokir. (tew)